***Solid Waste Capacity Index for Local Governments* (SCIL)**

**Dokumen Persiapan Survey SCIL**

**Komponen 2 – Kebijakan dan Hukum**

Survei SCIL adalah salah satu komponen dari Alat Indeks Kapasitas Pengelolaan Sampah untuk Pemerintah Lokal (*Solid waste Capacity Index for Local government*) dalam program Kota Bersih, Lautan Biru (Clean Cities, Blue Ocean) yang didukung oleh USAID. Survei SCIL ini terdiri dari enam komponen.

Dokumen ini menyediakan gambaran umum dari semua pertanyaan Komponen 2: Kebijakan dan Hukum yang terkandung dalam survei SCIL. Ini memungkinkan para peserta penilaian untuk meninjau setiap pertanyaan "Ya/Tidak" ini untuk menentukan mana yang dapat dijawab dengan "Ya" dan mulai mengumpulkan "bukti" untuk mendukung jawaban tersebut. Kolom terakhir dapat digunakan untuk melacak apakah bukti telah ditemukan. Jawaban dan bukti harus dimasukkan ke dalam Pelacak SCIL untuk membentuk Skor SCIL.

| **Kriteria** | **Pertanyaan #** | **Penilaian SCIL CCBO** **Pertanyaan Kriteria Kebijakan dan Hukum**  | **Tanggapan Awal –** Tandai jika Anda berpikir jawaban untuk pertanyaan ini adalah "Ya" | **Dokumentasi –** Berikan nama dan/atau URL dari dokumentasi untuk menunjukkan bahwa jawaban adalah "Ya" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerangka hukum lokal mencerminkan regulasi dan kebijakan pengelolaan sampah nasional dan provinsi (daerah). | 1 | Apakah regulasi dan kebijakan lokal mendukung regulasi, rencana, dan prioritas pengelolaan sampah nasional dan provinsi? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_  |  |
| Regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara efektif menerapkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan ekonomis. | 2 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan biaya untuk layanan sampah? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 3 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memberi izin kepada pihak swasta (perusahaan/individu) untuk melakukan layanan terkait sampah (mis., pengumpulan sampah, pengoperasian fasilitas persampahan, dll.)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| 4 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang memberi wewenang kepada staf terkait urusan lingkungan hidup atau aparatur pemerintahan daerah lainnya (yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pelanggaran pengelolaan sampah) untuk melakukan pendendaan? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| Spesifikasi operasional dasar untuk penanganan berbagai jenis sampah yang diwajibkan oleh regulasi. | 5 | Apakah regulasi atau kebijakan lokal mengharuskan **rumah tangga** untuk menangani sampah (mis., sampah residu, sampah dapat didaur ulang, sampah organik, dll.) yang mereka hasilkan dengan tepat? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| 6 | Apakah regulasi atau kebijakan lokal mengharuskan **non-rumah tangga** untuk menangani sampah (mis., sampah residu, sampah daur ulang, sampah organik, dll.) yang mereka hasilkan dengan tepat? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| 7 | Apakah regulasi atau kebijakan lokal mengharuskan pemilahan sampah, dan penangan sampah spesifik secara tepat (khususnya limbah B3, limbah konstruksi)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| Rencana pengelolaan sampah yang disetujui oleh pemerintah lokal. | 8 | Apakah pemerintah daerah memiliki kebijakan yang mengharuskan umpan balik dari warga/pemangku kepentingan selama proses perencanaan pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| 9 | Apakah pemerintah daerah memiliki kebijakan yang mengharuskan rencana pengelolaan sampah untuk disetujui secara formal? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| Kerangka hukum yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan sampah harus mengikuti hierarki "praktik terbaik" dalam pengelolaan material. | 10 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang mendukung, dan memberikan insentif untuk pencegahan timbulan sampah (pengurangan sejak di sumber)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| 11 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang memberikan insentif, atau mengharuskan bahwa material sampah diperoleh kembali untuk didaur ulang (termasuk bahan yang dapat terurai secara hayati)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| 12 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang memberikan insentif, atau mengharuskan teknologi alternatif untuk mengolah/memproses sampah yang tidak dapat dikurangi, digunakan kembali, atau didaur ulang? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| Kerangka hukum melarang tindakan/kegiatan yang mengganggu pengelolaan material sampah yang ramah lingkungan di bawah yurisdiksi pemerintah lokal. | 13 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang melarang pembuangan sampah sembarangan dan menetapkan denda untuk pembuangan sembarangan? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 14 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang melarang pembakaran sampah secara terbuka di properti pribadi atau publik? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 15 | Apakah ada regulasi atau kebijakan lokal yang melarang pembuangan sampah di tanah atau ke dalam saluran air tanpa izin khusus? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| Pemerintah daerah telah menunjuk unit pelaksana pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah | 16 | Apakah pemerintah daerah telah menunjuk sebuah unit pemerintahan daerah dengan tanggung jawab dan wewenang untuk implementasi, pengawasan, kepatuhan, dan pemantauan sistem pengelolaan sampah (mis., Dinas Lingkungan Hidup)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| Data pengelolaan sampah dikumpulkan, divalidasi, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan penegakan hukum | 17 | Apakah pemerintah daerah telah memperoleh data yang dilaporkan mengenai jumlah semua **sampah residu/tidak terpilah** yang dikumpulkan dari semua penghasil sampah? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 18 | Apakah pemerintah lokal telah memperoleh data yang dilaporkan tentang jumlah semua **sampah terpilah/dapat didaur ulang** (termasuk sampah organik) yang dikumpulkan dari semua penghasil sampah? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 19 | Apakah data jumlah sampah yang dilaporkan disimpan dalam basis data komputer oleh pemerintah daerah? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 20 | Apakah pemerintah daerah melacak pelanggaran kepatuhan terkait pengelolaan sampah dalam basis data terstruktur (ini mungkin termasuk data terkait pihak yang melanggar, lokasi geografis, jenis pelanggaran, dan tindakan penegakan yang diambil)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| Ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah | 21 | Apakah ada instruksi jelas tentang bagaimana warga dapat menyelesaikan atau mengajukan banding terhadap denda untuk pelanggaran terkait persampahan (mis., untuk kasus buang sampah sembarangan, dll.)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 22 | Apakah pelanggaran terhadap proses perizinan pengelolaan sampah di daerah dikomunikasikan secara tertulis dengan instruksi untuk putusan atau banding? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 23 | Apakah ada orang atau lembaga yang terpisah untuk mengeluarkan sanksi dan menerima pembayaran denda terkait pelanggaran pengelolaan sampah (untuk menghindari suap atau pemerasan)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 24 | Apakah ada mekanisme laporan untuk warga melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang (korupsi) oleh aparat pemerintahan daerah terkait sistem pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 25 | Apakah sudah ada prosedur lokal untuk mendapatkan izin pengelolaan sampah (untuk perusahaan pengangkutan atau fasilitas pengelolaan sampah) yang ditetapkan dan diumumkan secara terbuka untuk memastikan standar kebersihan, standar operasional yang aman, dan perlindungan lingkungan? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 26 | Apakah ada kebijakan lokal yang menetapkan secara jelas denda untuk pelanggaran hukum atau syarat izin pengelolaan sampah (misalnya, penangguhan atau pencabutan, denda, atau pidana)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |   |
| Praktik dan prosedur pengadaaan sistem pengelolaan sampah berlangsung transparan dan adil | 27 | Apakah ada protokol yang mengharuskan semua barang dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah diperoleh melalui proses pengadaan yang kompetitif? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 28 | Apakah ada protokol yang menetapkan pendekatan standar untuk mengurangi bias dalam pengadaan (misalnya, tender terbuka, prosedur evaluasi penawaran yang objektif, komite pengadaan, dan templat kontrak) untuk sistem pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| 29 | Apakah pengadaan (barang dan jasa) untuk pengelolaan sampah dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |
| Sistem pengelolaan sampah telah diinstitusionalisasi | 30 | Apakah komponen sistem pengelolaan sampah lokal telah diinstitusionalisasi dengan peraturan, kesepakatan, dokumen perencanaan, kontrak, dan/atau nota kesepahaman yang mempertahankan syarat dan ketentuan yang ada melebihi masa jabatan pejabat daerah terpilih? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_   |  |